



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Sudarmanto II Ketua Tim: Dirgohaju Widodo Editor:
Hermono I Desain Grafis: Kusumo Adi I Anggota: Dirgohaju W. I Bulus L.G I
Anang R. I Robby P. I Syahri A. I Suharyanto | Jimmy P. | Rahmat K. I

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Maluku

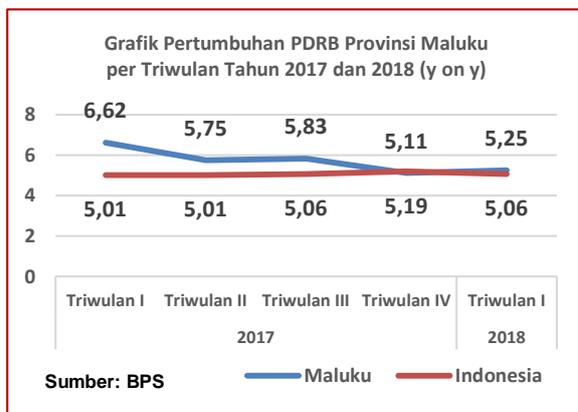
DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
	A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
	B. Inflasi	2
	C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBN.....	6
	A. Pendapatan Negara.....	6
	B. Belanja Negara.....	9
	C. Prognosis Realisasi APBN.....	11
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBD.....	12
	A. Pendapatan Daerah.....	13
	B. Belanja Daerah.....	17
	C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2017.....	18
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASI (APBD DAN APBD).....	19
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	24
	A. Rakyat Maluku Sejahtera dDari Cash For Work Dana Desa.....	24
	B. Maluku Ekspor Perdana Tuna Segar Langsung dari Ambon	25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

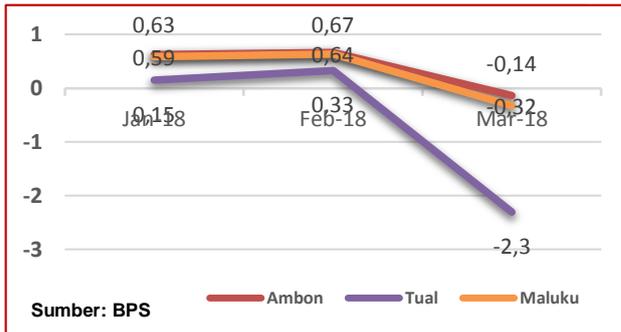
Pertumbuhan Ekonomi Maluku tercatat 5,25% pada triwulan I 2018. Perekonomian Maluku pada Triwulan I 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp10,27 triliun. PDRB Maluku Triwulan I 2018 mampu tumbuh 5,25% (yoy) menurun dibanding triwulan I 2017 sebesar 6,62%, namun masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat nasional yang sebesar 5,06%. Sementara pada Triwulan I 2018 Pertumbuhan ekonomi Maluku menduduki peringkat 19 dari 34 provinsi di Indonesia turun 12 peringkat dari Triwulan I 2017.



Dari sisi Pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2018 terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Impor Luar Negeri sebesar 11,83%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 10,59% dan konsumsi pemerintah sebesar 10,44%. Konsumsi Pemerintah mampu tumbuh tinggi

disebabkan oleh percepatan belanja barang yang naik 19,94% dan belanja sosial yang naik 83,34%, apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017 akibat dari adanya pilkada serentak.

Sementara dari sisi lapangan usaha pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi 9,7% dan pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi 0,11%. Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 7,96%, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 7,69% dan Administrasi pemerintahan sebesar 7,58%. Persiapan persediaan menyambut puasa dan hari raya idul fitri menjadi penyebab perdagangan besar dan eceran mampu tumbuh tinggi. Sementara pembangunan hotel antara lain Hotel Santika dan rumah sakit internasional antara lain rumah sakit Siloam, yang masih berlangsung juga ikut memberkan andil dalam tumbuhnya lapangan usaha konstruksi.



Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2018 Provinsi Maluku mempunyai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,27% - 6,77%, sementara realisasi TW I sebesar

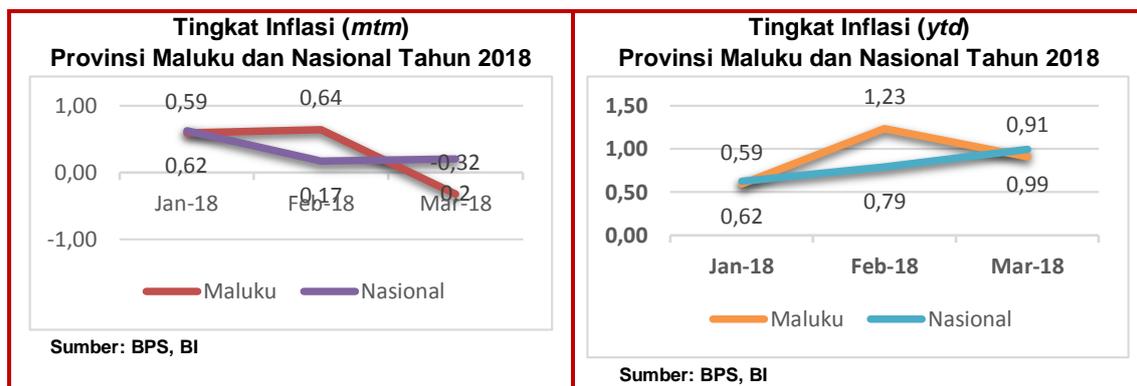
5,25% atau dibawah target. Artinya sampai dengan triwulan I masih dibawah target sebesar 1,02%.

Dari sisi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan ekspor menyebabkan pertumbuhan ekonomi kurang maksimal, karena hanya mampu tumbuh masing-masing 3,06% dan 4,23%. Untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% pada tahun 2018 di Maluku, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Dana Desa dengan program *cash for work* yang diharapkan mampu untuk menaikkan daya beli masyarakat.
2. Bantuan sosial yang tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat
3. Peningkatan ekspor khususnya pada komoditi ikan dan udang dengan memanfaatkan ekspor langsung ke luar negeri yang telah difasilitasi langsung dari pelabuhan di Ambon dan Tual dan Bandara Pattimura. Sebelumnya untuk ekspor di Maluku harus melalui pelabuhan dan Bandara diluar Maluku.

B. Inflasi

Laju Inflasi di Maluku pada triwulan I tahun 2018 masih terkendali. Inflasi di Provinsi Maluku diwakili oleh 2 kota yaitu Kota Tual dan Kota Ambon. Inflasi Provinsi Maluku sampai dengan Maret 2018 (ytd) sebesar 0,91% lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 0,99%. Pada bulan Januari dan Februari terjadi inflasi sebesar 0,59 dan 0,64, sementara pada bulan Maret 2018 terjadi deflasi 0,32%, lebih rendah dari tingkat nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,2%.



Kota Ambon dan Kota Tual mengalami deflasi karena bahan makanan. Kota Ambon pada bulan Maret 2018 mengalami deflasi 1,4%. Deflasi di Kota Ambon terjadi karena adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2 kelompok pengeluaran yakni

pada kelompok bahan makanan sebesar 1,29% dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,03%. Persediaan yang melimpah menjelang hari puasa dan hari raya idul fitri di Kota Ambon dan pemintaannya belum naik menjadi salah satu penyebab terjadinya deflasi.

Kota Tual pada bulan Maret mengalami deflasi sebesar 2,30%. Deflasi di Kota Tual ini terjadi karena adanya penurunan IHK pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 4,63%; dan pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,57%. Melimpahnya persediaan ikan cakalang, ikan ekor kuning, ikan layang dan ikan baronang sedangkan permintaan belum naik, memberikan andil terjadinya deflasi di Kota Tual. Turunnya harga tiket angkutan udara akibat penambahan jadwal penerbangan dari Tual ke Ambon dan sebaliknya, yang awalnya 3 penerbangan menjadi 4 penerbangan setiap hari turut serta memberikan andil dalam terjadinya deflasi di Kota Tual.

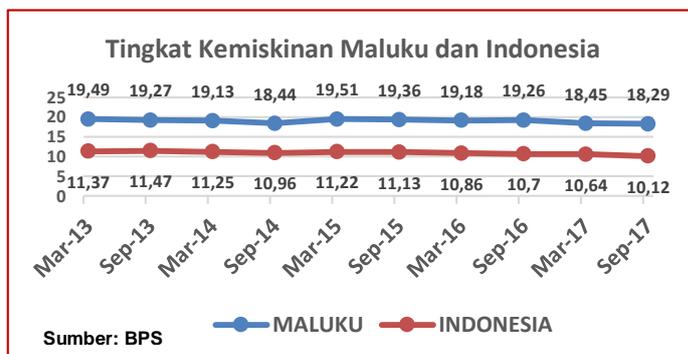
Target Inflasi di Provinsi Maluku sesuai dengan dokumen KUA tahun 2017 sebesar 3,25-3,75%. Dari target tersebut, realisasi inflasi s.d Maret 2018 (ytd) sebesar 0,91%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Maluku masih terjaga. Hal-hal yang menyebabkan inflasi di Maluku terutama permintaan atas bahan makanan.

Untuk menjaga tingkat inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus memperhatikan ketersediaan 3 kelompok penyumbang inflasi khususnya mendekati hari-hari besar keagamaan. Beberapa rekomendasi yang akan diberikan kepada TPID antara lain: mengatur *stock* barang khususnya bahan makanan, memperlancar arus distribusi barang dengan memanfaatkan Tol laut yang telah berjalan, membangun konektivitas antar daerah di wilayah Maluku dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi (kapal laut dan pesawat udara).

C. Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan masyarakat dapat diproksikan dengan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan (gini rasio) dan tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah.

1. Tingkat Kemiskinan

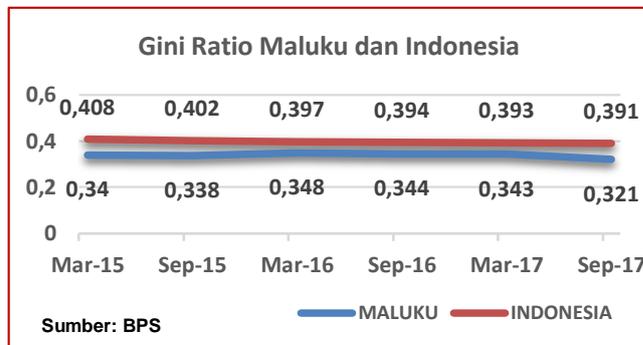


Tingkat Kemiskinan di Maluku mulai membaik meskipun belum signifikan. Tingkat Kemiskinan pada periode 2013-2017 di Provinsi Maluku menunjukkan trend yang semakin menurun dari waktu ke waktu kecuali periode

September 2014 s.d maret 2015 dan Maret 2016 s.d September 2016. Apabila dibandingkan antara periode September 2017 yang tingkat kemiskinannya sebesar 18,29% ke September 2016 yang tingkat kemiskinannya 19,26%, terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,97%. Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 disumbangkan oleh penduduk kota yang jumlahnya 47.830 jiwa yang mampu turun 0,66%, sementara penduduk desa yang jumlahnya 272.590 jiwa mengalami kenaikan 0,46%.

Bila dibandingkan dengan nasional, kemiskinan di Provinsi Maluku sangat tertinggal jauh. Pada September 2017 tingkat kemiskinan Maluku sebesar 18,29%, lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 10,12%. Tingkat Kemiskinan Maluku sejak tahun 2016 berada pada peringkat 4 dari 34 Provinsi di Indonesia. Penyebab tingginya kemiskinan di Provinsi Maluku antara lain karena Perekonomian Maluku masih mengandalkan APBN dan APBD sebagai pendorong utama, infrastruktur yang belum memadai; Konektivitas antar pulau yang belum baik; Tingkat Pendidikan yang rendah, dan investasi yang rendah di Provinsi Maluku. Dana Desa belum juga dapat dimanfaatkan untuk menekan kemiskinan dengan melihat indikator penduduk miskin di desa yang mengalami kenaikan 0,46% pada tahun 2017.

2. Gini Ratio



Gini ratio Maluku semakin membaik. Gini Ratio Provinsi Maluku pada September 2017 tercatat sebesar 0,321. Angka ini menurun sebesar 0,023 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar

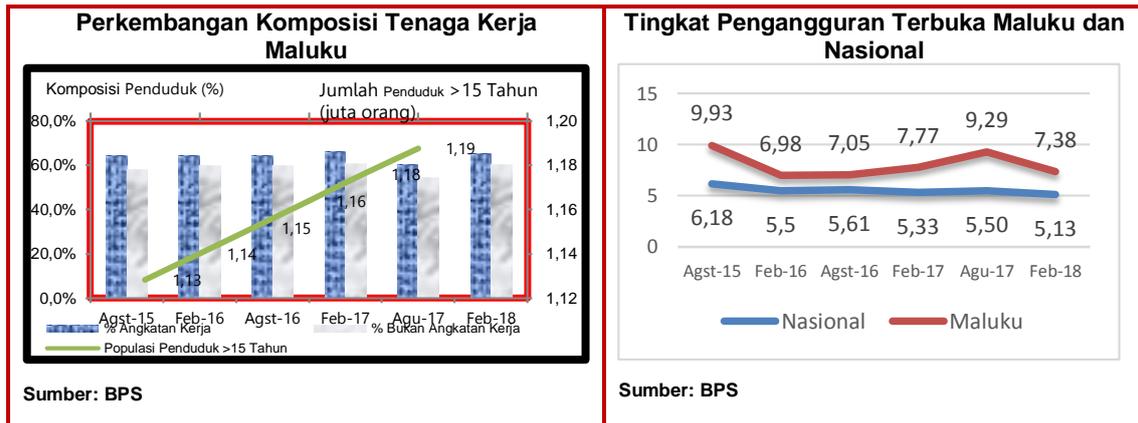
0,344 dan lebih baik dari tingkat nasional sebesar 0,391. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di wilayah Maluku lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional.

Menurut BPS, Faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan gini ratio di Wilayah Maluku adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok terbawah dan menengah 40% meningkat lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok 20% teratas.
2. Kenaikan pengeluaran kelompok bawah tidak terlepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan pemerintah.

3. Ketenagakerjaan

Pengangguran di Propinsi Maluku pada Februari 2018 tercatat menurun. Pada Februari 2018, dari 1.187.642 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Provinsi Maluku, 772.174 orang diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam setahun terakhir terjadi peningkatan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, artinya terjadi peningkatan yang disebabkan struktur umur penduduk (demografi).



Pada Februari 2018, dari 772.174 angkatan kerja, 56.958 orang diantaranya masih dalam posisi menganggur. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 7,77% (Februari 2017) menjadi 7,37% (Februari 2018). Pada bulan Februari 2018 TPT Provinsi Maluku lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 5,13%. Penurunan tingkat pengangguran disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang mulai meningkat akibat pilkada serentak pada 2 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Selain itu program *cash for work* dana desa yang mulai disalurkan pada bulan Januari 2018 turut andil dalam mengatasi pengangguran di Provinsi Maluku

Target dan realisasi indikator kesejahteraan Provinsi Maluku Tahun 2018

No	Indikator Kesejahteraan Masyarakat	Target	Realisasi	Selisih (Realisasi – Target)
1	Tingkat Kemiskinan (%)	15,30	18,29	3,01
2	Tingkat Pengangguran (%)	6-6,5	7,37	0,87
3	Gini Ratio	-	0,343	-

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam tiap-tiap indikator kesejahteraan yang telah diuraikan di atas, maka untuk mencapai target kemiskinan dan tingkat pengangguran dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Segera direalisasikan dana APBN dan APBD belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti dana desa, bantuan sosial, dan proyek-proyek infrastruktur.
2. Memanfaatkan program *cash for work* dalam penggunaan dana desa
3. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan khususnya masalah konektivitas yang ada di Maluku.
4. Mendorong investasi di wilayah Maluku dengan cara menawarkan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk mengolah sumber daya alam dan mempercepat proses pengelolaan Blok Masela.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Realisasi APBN triwulan I tahun 2018 di Provinsi Maluku meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Realisasi Pendapatan Negara di lingkup Provinsi Maluku sampai dengan triwulan I tahun 2018 mencapai Rp343,30 miliar lebih tinggi 11,43% dari triwulan I tahun 2017. Realisasi belanja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp4.091,37 miliar lebih tinggi 4,14% daripada belanja triwulan I tahun 2017. Hal ini berarti sampai akhir triwulan I tahun 2018 di Provinsi Maluku terdapat defisit sebesar Rp3.748,02 miliar lebih tinggi 3,52% dari triwulan I tahun 2017.

Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Maluku s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

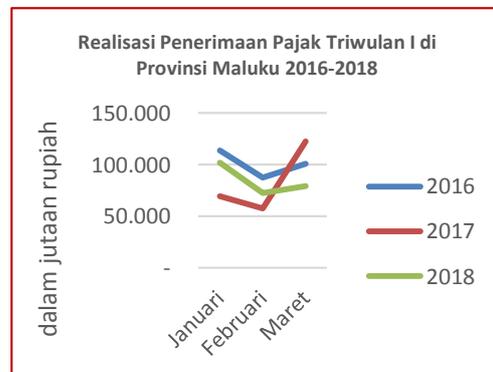
Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	2.386,25	308,09	2.150,29	343,30
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.386,25	307,47	2.150,29	343,00
1. Penerimaan Pajak	2.178,85	249,34	1.991,83	253,60
2. PNBPN	207,40	58,13	158,46	89,39
II. HIBAH				
III. PAJAK INTERNASIONAL		0,62	0,62	0,30
B. BELANJA NEGARA	19.919,91	3.928,84	20.289,84	4.091,32
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	7.073,83	849,19	7.779,81	960,75
1. Belanja Pegawai	2.571,08	490,64	2.641,82	496,58
2. Belanja Barang	2.383,82	227,08	2.902,56	322,68
3. Belanja Modal	2.099,41	131,38	2.220,49	140,78
4. Belanja Bantuan Sosial	19,52	0,09	14,94	0,71
5. Belanja Lain-lain	0	0	0	0
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DD	11.884,48	3.079,65	11.546,55	2.937,88
1. Dana Perimbangan	11.589,46	2.920,89	11.438,05	2.896,75
a. Dana Transfer Umum	8.346,12	2.664,73	8.251,22	2.690,35
1) Dana Bagi Hasil	623,21	95,30	292,53	46,68
2) Dana Alokasi Umum	7.722,91	2.569,43	7.958,69	2.643,67
b. Dana Transfer Khusus	3.243,34	256,16	3.186,83	206,40
1) DAK Fisik	2.032,02	0	1.867,55	0
2) DAK Non Fisik	1.211,31	256,16	1.319,27	206,40
2. Dana Insentif Daerah (DID)	295,02	158,76	108,50	41,13
3. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0
III. DANA DESA	961,60	0	963,49	192,70
C. SURPLUS/DEFISIT	-17.533,67	-3.620,75	-18.139,55	-3.748,02

Sumber: OMSPAN, Simtrada (diolah)

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

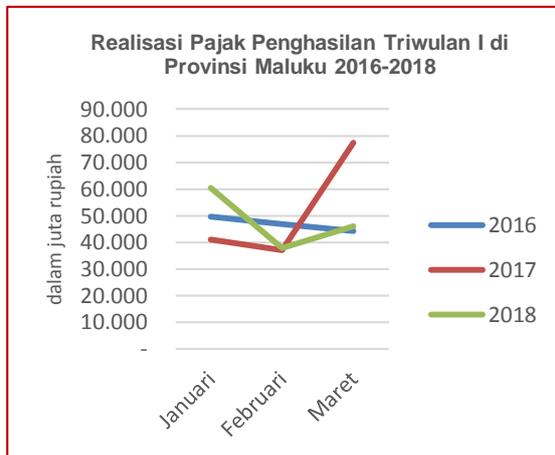
Realisasi pendapatan perpajakan triwulan I meningkat namun tidak signifikan. Sampai dengan akhir triwulan I 2018, penerimaan pajak sebesar Rp253,60 miliar. Lebih tinggi 1,71% dibanding realisasi triwulan I tahun 2017



Sumber: KPP Pratama Ambon (diolah)

sebesar 249,34 miliar. Penerimaan tertinggi tercatat di Kota Ambon menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Provinsi Maluku masih terpusat di Kota Ambon.

a) Pajak Penghasilan (PPh)

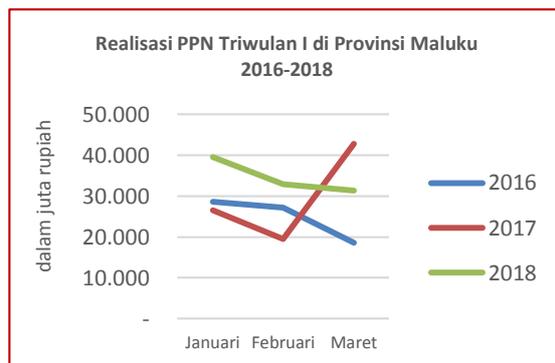


Sumber: KPP Pratama Ambon (diolah)

Realisasi triwulan I tahun 2018 sebesar Rp144,43 miliar turun 7,02% dari triwulan I tahun 2017 sebesar Rp155,38 miliar. Apabila dikeluarkan penerimaan Tax Amnesty periode triwulan I tahun 2017, maka realisasi penerimaan PPh triwulan I 2018 ini tumbuh 15,48% dibanding triwulan I tahun 2017. Penerimaan PPh didominasi di Kota Ambon yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ini. Disimpulkan bahwa aktifitas perekonomian terpusat di Kota

Ambon dan penduduk penghasilan tinggi dominan di Kota Ambon.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

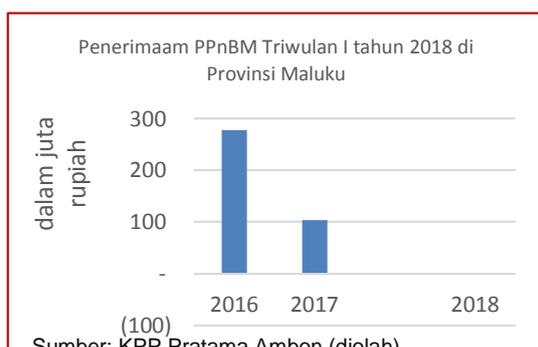


Sumber: KPP Pratama Ambon (diolah)

Realisasi PPN di Provinsi Maluku dalam triwulan I 2018 sebesar Rp103,79 miliar. Meningkat 12,25% dibanding dengan penerimaan triwulan I tahun 2017. Triwulan I tahun 2017 dibandingkan dengan triwulan I 2016 mengalami kenaikan lebih tinggi yaitu sebesar 19,62%. Kota Ambon mendominasi pencatatan PPN yang

berlangsung sepanjang tiga tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan masih terpusatnya kegiatan ekonomi terutama perdagangan barang yang terkena PPN di Kota Ambon.

c) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)



Sumber: KPP Pratama Ambon (diolah)

Tidak ada realisasi penerimaan PPnBM di Provinsi Maluku triwulan I tahun 2018. Tahun 2016-2017, penerimaan PPnBM hanya tercatat di Kota Ambon dan mengalami penurunan. Triwulan I tahun 2016 terealisasi Rp227,57 juta menurun 62,71% menjadi Rp103,51 juta pada triwulan

I tahun 2017. Kondisi ini mengindikasikan di triwulan I tahun 2018 nihil konsumsi barang yang termasuk dalam kategori barang terkena PPnBM di Provinsi Maluku.

d) Penerimaan Cukai

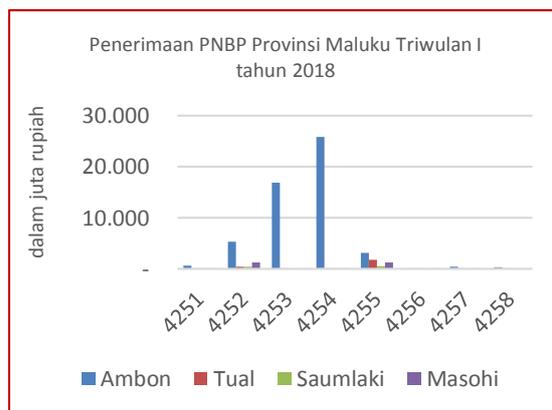


Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi penerimaan Cukai di Provinsi Maluku dalam triwulan I 2018 sebesar Rp0,25 miliar. Nilai ini meningkat 48,51% dibanding penerimaan triwulan I tahun 2017 sebesar Rp0,04 miliar. Penerimaan triwulan I tahun 2017 dibandingkan dengan triwulan I 2016 mengalami kenaikan 100,00% karena tidak ada realisasi penerimaan cukai pada tiga bulan pertama tahun 2016. Penerimaan Cukai masih didominasi oleh Kota Ambon sebagai pintu gerbang utama lalu lintas perdagangan Provinsi Maluku dan seluruhnya merupakan pendapatan denda administrasi cukai.

Masih terpusatnya kegiatan perekonomian di Kota Ambon membuat penerimaan perpajakan terpusat di Kota tersebut. Direkomendasikan untuk memperluas aktifitas ekonomi ke kabupaten dan kota diluar Pulau Ambon. Dengan memberikan kemudahan ataupun insentif bagi pengusaha untuk beraktivitas diluar Kota Ambon dinilai dapat memunculkan wajib pajak di luar Kota Ambon serta meningkatkan penerimaan subsektor pajak lainnya. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan serta identifikasi dan penggalian potensi pajak melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dapat dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Provinsi Maluku. Pengembangan pelabuhan dan bandara di luar kota Ambon dan Kota Tual bisa menjadi alternatif dalam meningkatkan pendapatan khususnya dari pendapatan cukai.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



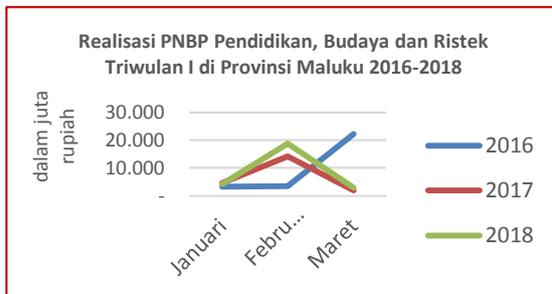
Sumber: OMSPAN (diolah)

sebesar Rp25,9 miliar dan PNBP Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak triwulan I tahun 2018 meningkat signifikan. Sampai dengan akhir triwulan I 2018, realisasi PNBP mencapai Rp89,25 miliar meningkat 54,66% dari triwulan I tahun 2017 sebesar Rp57,70 miliar. Realisasi PNBP triwulan I tahun 2018 disumbangkan PNBP Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

Keagamaan sebesar Rp16,84 miliar. Dibandingkan dengan PNBPN Pendapatan Administrasi Penegakan Hukum sebesar Rp7,63 miliar dan PNBPN lainnya

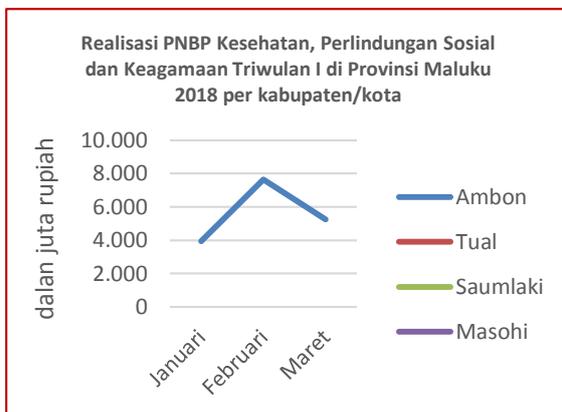
a) PNBPN Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi



Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi dalam triwulan I 2018 sebesar Rp25,9 miliar. Meningkat 24,93% dibanding triwulan I tahun 2017 sebesar Rp20,73 miliar. Penerimaan tertinggi di Kota Ambon dan Kota Tual karena adanya beberapa institusi pendidikan antara lain universitas pattimura, STAIN Ambon,.

b) PNBPN Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan



Sumber: OMSPAN (diolah)

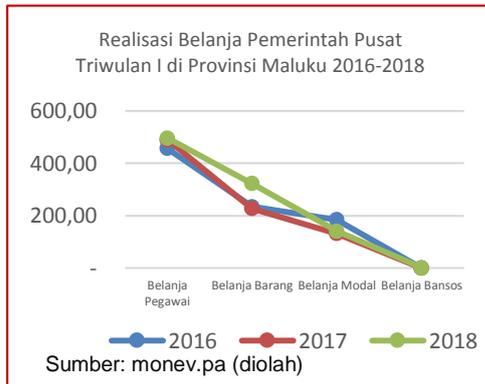
Realisasi dalam triwulan I 2018 sebesar Rp16,84 miliar. Kota Ambon juga mendominasi penerimaan PNBPN ini pada triwulan I 2018. Penerimaan terbesar adalah penerimaan jasa kesehatan yang total pada triwulan I ini mencapai nilai Rp16,48 miliar sebagai konsekuensi ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang paling lengkap di Kota Ambon.

Pengembangan daerah diluar Pulau Ambon bisa menjadi titik tolak peningkatan realisasi penerimaan PNBPN di Provinsi Maluku. Sebagian besar PNBPN diperoleh dari pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu, pemerataan pelayanan kepada masyarakat bisa meningkatkan pendapatan Negara dari sektor non pajak.

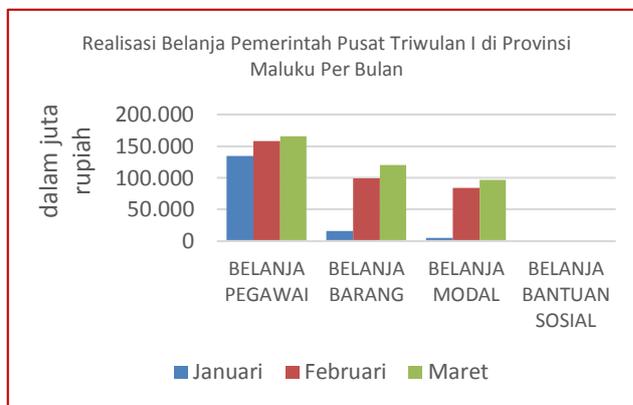
B. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara di Provinsi Maluku triwulan I 2018 sebesar Rp4.091,32 miliar, lebih tinggi 4,14% dibanding dengan realisasi triwulan I 2017 sebesar Rp3.928,84 miliar. Belanja negara Provinsi Maluku dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat



Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku dalam triwulan I tahun 2018 sebesar Rp960,75 miliar. Terjadi peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat yang cukup signifikan, sebesar 13,14% dibandingkan dengan realisasi triwulan yang sama pada tahun 2017. Sementara pada periode triwulan I tahun 2017 apabila dibandingkan dengan triwulan I 2016 mengalami penurunan sebesar 3,02%. Hal ini karena pada triwulan I 2017 dilaksanakan self blocking dengan nilai Rp541,31 miliar.



Realisasi belanja pegawai di akhir triwulan I tahun 2018 mencapai Rp496,62 miliar, meningkat 1,21% dibanding dengan realisasi triwulan I tahun 2017 sebesar Rp490,64 miliar. Belanja barang mencapai Rp322,68 miliar dan mengalami peningkatan sebesar 41,93% dibanding triwulan I tahun 2017 sebesar Rp227,08 miliar.

Hal yang sama terjadi pada belanja modal yang naik 7,08% dan belanja bantuan sosial yang naik 692% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Maluku tiap bulan mengalami peningkatan dengan realisasi tertinggi masih pada belanja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pemerintah sebagian besar masih dipergunakan untuk keperluan konsumsi.

Realisasi Belanja Modal dibawah realisasi Belanja Pegawai menunjukan pemerintah belum mampu sepenuhnya meningkatkan pengeluaran yang produktif. Seleksi ketat dalam penerimaan pegawai dan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat luas bias menjadi jalan untuk merubah ketidakseimbangan tersebut

Realisasi TKDD di Provinsi Maluku mencapai 25,02% dari total alokasi.

TKDD terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp3.130,56 miliar. Lebih tinggi 1,65% dibanding realisasi



triwulan I tahun 2017 sebesar Rp3.079,63 miliar. Dana Desa Tahap I 2018 telah tersalurkan ke RKUD sebesar Rp192,69 miliar dan tertinggi adalah Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp30,11 miliar.

3. Manajemen Investasi Pusat

Perjanjian Penerusan Pinjaman dengan debitur Provinsi Maluku dan PDAM Kota Ambon telah selesai dan tinggal menunggu penutupan secara administratif.

Pemda Provinsi Maluku telah melunasi dua pinjaman, yaitu AMA-155/PRJ-139B dan AMA-164/RDI-358/2012. Untuk RDI-358/DP3/1999 dan PRJ-139/MK.11/1983 masuk program restrukturisasi dan menunggu penyelesaian administratif. Pinjaman PDAM Kota Ambon SLA-12/029/IBRD/PP dan 12/029/IBRD/PP, masuk program restrukturisasi dan menunggu penyelesaian administratif atas pengalihan status pinjaman ke Pemerintah Kota Ambon melalui penyertaan modal pemda pada BUMD.

Daftar Penerusan Pinjaman di Provinsi Maluku Tahun 2018

No	Nomor Perjanjian	Hak Tagih Pemerintah	Status
Pemerintah Provinsi Maluku			
1	RDI-358/DP3/1999	Rp59.017.326.533,02	cut off date restrukturisasi
2	PRJ-139B/MK.11/1983	Rp10.000.030,00	cut off date restrukturisasi
3	AMA-155/PRJ-139B	Rp0,00	Lunas
4	AMA-164/RDI-358/2012	Rp2.725.468.750,00	Lunas
PDAM Kota Ambon			
1	SLA-12/029/IBRD/PP	Rp0,00	cut off date restrukturisasi
2	12/029/IBRD/PP	Rp589.182.554,00	cut off date restrukturisasi

Sumber: Kanwil DJPB Promal

C. Prognosis Realisasi APBN

Realisasi pendapatan dan belanja Negara sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan masing-masing 80,92% dan 93,98%. Prognosis realisasi APBN mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi makro dan nasional serta kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah serta merujuk kepada KUA Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkiraan belanja juga melihat kepada data historis triwulanan tahun sebelumnya.

Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Maluku s.d. Triwulan IV Tahun 2018 dalam jutaan rupiah

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi thd Pagu
Pendapatan Negara	2.150,29	343,30	15,97%	1.740,04	80,92%
Belanja Negara	20.289,84	4.091,32	20,16%	19.068,30	93,98%
Surplus/Defisit	-18.139,55	-3.748,02	20,66%	-17.328,27	95,53%

Sumber: Kanwil DJPB Promal

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Realisasi APBD wilayah Maluku Triwulan I 2018 menunjukkan hasil yang positif.

Wilayah Maluku terdiri atas dua belas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	14.057,06	3.144,47	14.308,47	3.187,96
PAD	1.380,63	99,90	1.473,35	138,95
Pajak Daerah	526,54	49,55	548,46	89,91
Retribusi Daerah	187,75	30,38	218,03	28,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	63,56	0,35	50,00	-
Lain-Lain PAD yang Sah	602,77	19,61	656,86	20,14
Pendapatan Transfer	12.387,38	3.021,87	12.601,26	3.048,95
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	11.032,78	2.832,67	11.468,56	2.819,78
Dana Bagi Hasil Pajak	242,38	131,66	323,06	40,69
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	76,11	6,32	-	-
Dana Alokasi Umum	7.736,59	2.488,04	7.958,69	2.594,93
Dana Alokasi Khusus	2.977,70	206,66	3.186,82	184,15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.095,05	162,43	876,11	209,98
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	1.095,05	162,43	876,11	209,98
Transfer Pemerintah Provinsi	166,49	26,77	166,05	1,09
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	160,66	26,77	166,05	0,94
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5,83	-	-	0,14
Transfer Bantuan Keuangan	93,06	-	90,53	18,11
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	93,06	-	90,53	18,11
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	289,04	22,70	233,86	0,07
Pendapatan Hibah	255,17	0,06	233,86	0,07
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	33,87	22,64	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	14.057,06	3.144,47	14.308,47	3.187,96
BELANJA	14.308,58	1.221,65	13.156,80	1.324,04
Belanja Pegawai	4.707,74	671,30	4.690,43	701,23
Belanja Barang	3.761,14	251,44	3.820,52	251,25
Belanja Bunga	0,94	-	1,50	-
Belanja Subsidi	14,09	1,35	17,67	1,63
Belanja Hibah	858,97	161,48	917,96	291,54
Belanja Bantuan Sosial	49,14	2,80	58,20	4,59
Belanja Bantuan Keuangan	1.080,25	15,42	-	-

Belanja Modal	3.786,64	112,52	3.589,96	62,92
Belanja Tidak Terduga	49,69	5,34	60,56	10,87
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	1.161,84	43,60	1.825,31	55,21
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	238,89	37,71	42,52	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	238,15	37,71	42,52	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,75	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	922,94	5,89	1.782,80	55,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	165,27	0,74	16,90	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	756,23	5,15	1.765,63	55,21
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,44	-	0,26	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	15.470,42	1.265,25	14.982,11	1.379,25
SURPLUS/DEFISIT	(1.413,36)	1.879,21	(673,64)	1.808,72

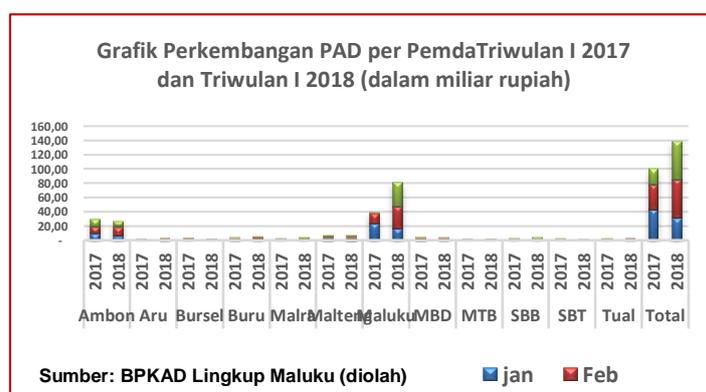
Sumber: BPKAD/DPPKAD pemda lingkup Provinsi Maluku (diolah)

Realisasi pendapatan mengalami kenaikan 1,38%. Capaian Pendapatan secara agregat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 mencapai Rp3,18 triliun naik dari triwulan I 2017 yang sebesar Rp3,14 triliun. Kenaikan realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami kenaikan 0,44% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 39,09%.

Realisasi Belanja dan Transfer mengalami kenaikan 9,01%. Capaian Belanja dan Transfer secara agregat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 sebesar Rp1,37 triliun naik dari triwulan I 2017 yang sebesar Rp1,26 triliun. Kenaikan realisasi belanja dan transfer ini dipengaruhi oleh Belanja Daerah yang mengalami kenaikan 8,38% dan Transfer Pemerintah Daerah yang juga mengalami kenaikan sebesar 26,62%.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



PAD Triwulan I menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara agregat PAD Pemda lingkup Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 sebesar Rp138,95 miliar atau 9,43% dari pagu. Realisasi ini

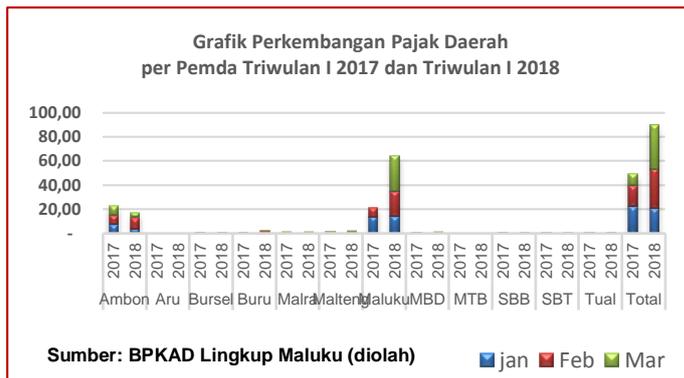
meningkat 39,09% bila dibandingkan dengan triwulan I 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah yang mampu tumbuh 81,44% dan lain-lain

pendapatan yang sah yang tumbuh 2,69%. Sementara retribusi daerah mengalami penurunan 4,89%.

Apabila dilihat PAD pada pemerintah Daerah, 7 Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Maluku, Kabupaten Aru, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagin Barat dan Kota Tual s.d triwulan I 2018 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017. Sementara 5 Pemda yaitu Kota Ambon, kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami penurunan.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah meningkat signifikan. Secara agregat pajak daerah pemda seluruh Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 sebesar Rp89,91 miliar atau meningkat 81,44% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017 sebesar Rp49,55 miliar. Peningkatan pajak daerah ini disumbangkan oleh 6 Pemda yang mengalami kenaikan, 4 Pemda yang mengalami penurunan dan 2 pemda stagnan karena belum ada realisasi



s.d triwulan I tahun 2017 maupun tahun 2018.

Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi sumber pertumbuhan pendapatan pada triwulan I tahun 2018 paling signifikan di Provinsi Maluku. Hal ini

disebabkan semakin bertambahnya kendaraan bermotor dan adanya acara tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Ambon. Khusus di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Barat Daya pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan yang sangat signifikan lebih dari 200%. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan (perumahan) yang mulai gencar dilaksanakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah secara agregat mengalami penurunan. Secara agregat retribusi pemda seluruh Maluku sampai dengan akhir triwulan I 2018 sebesar Rp28,90 miliar atau mengalami penurunan 4,89% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017 sebesar Rp30,38 miliar. Retribusi daerah ini dipengaruhi oleh 6 Pemda yang mengalami kenaikan dan 6 Pemda yang mengalami penurunan.



Secara agregat retribusi jasa umum (Retribusi sewa tanah dan bangunan, dan retribusi rekreasi) menjadi penyumbang penurunan pada triwulan I tahun 2018. Khusus kota Ambon Retribusi pada triwulan I

2018 mengalami peningkatan 20,22%. Hal ini disebabkan karena retribusi perparkiran yang mengalami kenaikan 122,32%. Naiknya retribusi parkir disebabkan oleh implementasi parkir *cluster* yang sukses diterapkan mampu mendorong pertumbuhan retribusi di Kota Ambon.

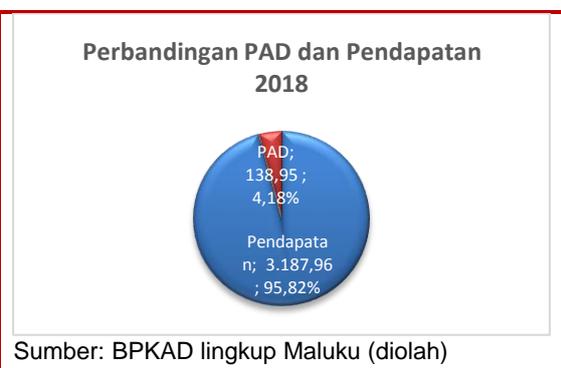
c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan



Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan masih belum terealisasi.

Secara agregat Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pemda di Maluku sampai

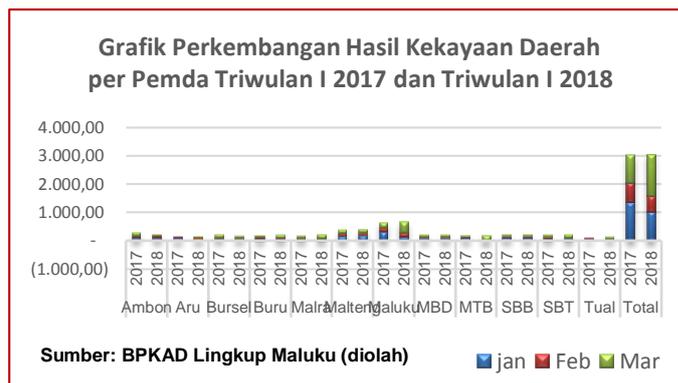
dengan akhir triwulan I tahun 2018 masih belum terealisasi atau mengalami penurunan 100% dari triwulan I 2017 yang sebesar Rp400 juta. Tidak adanya deviden yang dibagikan dari Bank Maluku menjadi salah satu penyebab hasil kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum terealisasi.



Kemandirian Fiskal Maluku menunjukkan perbaikan. Kemandirian fiskal tercermin dari perbandingan antara PAD dengan total pendapatan. Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Agregat Pemda di Maluku pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar 4,18% atau naik dari triwulan I 2017 yang sebesar 3,08%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih rendah namun kemandirian fiskal pemda di Maluku telah menunjukkan perbaikan. Rendahnya PAD disebabkan oleh Pemda-Pemda di Maluku belum sepenuhnya menggali secara maksimal sumber-sumber PAD. Kekayaan yang melimpah di Maluku tidak menjamin PAD yang diterima menjadi lebih baik. Infrastruktur yang masih kurang menjadi salah satu penyebab investor tidak mau menanamkan modalnya di Maluku.

Untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal, Pemda di Maluku harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dengan menarik investor-investor agar dapat menanamkan modalnya, yang diiringi dengan perbaikan infrastruktur yang ada di Maluku.

2. Pendapatan Transfer



Realisasi Pendapatan Transfer mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Total pendapatan transfer agregat pemda lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 sebesar Rp3,04 triliun atau mengalami kenaikan

0,90% dari Triwulan I 2017 sebesar Rp3,02 triliun. Pendapatan transfer dipengaruhi oleh Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp2,82 triliun, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp209,98 miliar, Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp1,09 miliar dan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp18,11 miliar.

Apabila dilihat dari 12 (dua belas) Pemerintah Daerah, pada Triwulan I 2018, 6 Pemda mengalami peningkatan dan 6 Pemda juga mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan Triwulan I 2017. 6 Pemda yang mengalami peningkatan dikarenakan telah disalurkan dana desa tahap I sebesar 20%, DAK Non Fisik dan tidak ada penundaan DAU. Sementara 6 Pemda yang mengalami penurunan dikarenakan adanya penundaan penyaluran DAU dan terlambatnya penyaluran DAK Non Fisik Semester I. Penundaan Penyaluran DAU dikarenakan Pemda belum menyampaikan laporan rencana penggunaan kas, dan laporan belanja modal. Sementara penundaan penyaluran DAK

Non Fisik dikarenakan Pemda belum menyampaikan laporan penggunaan dana dan laporan capaian output.

Rekomendasi untuk pemerintah daerah terkait dengan Pendapatan Tranfer adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya penundaan DAU, pemda harus menyampaikan laporan kas posisi, dan laporan belanja modal tepat waktu yaitu maksimal tanggal 10 setiap bulannya melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)..
2. agar DAK non Fisik segera disalurkan pemda harus segera menyampaikan laporan penggunaan dana dan capaian output atas DAK non Fisik tahun 2017.
3. Terkait transfer yang lain yang penyalurannya menurut aturan sudah dapat dilakukan seperti DAK Fisik dan Dana Desa Tahap kedua, pemda harus segera memenuhi persyaratan penyaluran yang diupload di OMSPAN.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

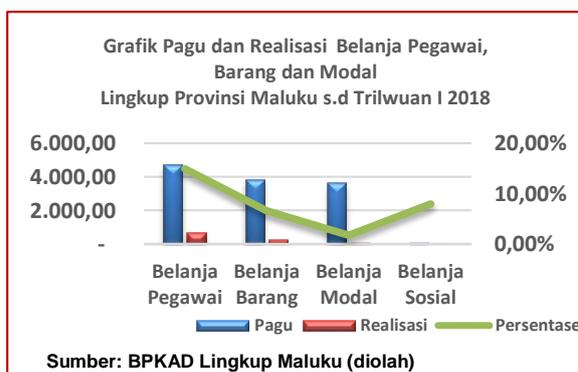


Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan yang signifikan. Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah secara agregat lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan I 2018

sebesar Rp0,07 miliar atau mengalami penurunan 99,71% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017 yang sebesar Rp22,70 miliar. Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah pada triwulan I 2018 disebabkan turunnya pendapatan hibah.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal



Realisasi belanja pegawai, barang dan modal masih rendah. Realisasi Belanja pegawai pemda lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 sebesar Rp701,23 miliar atau 14,95% dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp251,25 miliar atau 6,58% dari pagu, Belanja Modal sebesar Rp62,92 miliar atau 1,75% dari pagu, Dan realisasi

Belanja Sosial sebesar Rp4,59 miliar atau 7,89% dari pagu.

Rendahnya Belanja Pegawai dipengaruhi oleh belum diterimanya tunjangan guru, Sedangkan rendahnya realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa yang lambat termasuk e-katalog (barangnya belum masuk dalam e-katalog). Selain itu Realisasi belanja modal dipengaruhi oleh lamanya proses pemenuhan persyaratan yang dananya berasal dari DAK Fisik yaitu rencana kegiatan yang harus disetujui oleh Kementerian Teknis.

2. Belanja Langsung dan Tidak Langsung



Realisasi belanja tidak langsung masih lebih dominan. Realisasi total Belanja pemda lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 sebesar Rp1,32 triliun atau 10,06% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp320,88 miliar atau 4,21% dari pagu dan Belanja tidak

langsung sebesar Rp1.003,16 miliar atau 18,13% dari pagu. Dominannya belanja tidak langsung disebabkan karena belanja digunakan untuk pembayaran gaji dan operasional kantor. Sedangkan realisasi belanja langsung masih rendah karena masih dalam proses pengadaan terutama untuk belanja modal.

Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pembayaran hak-hak ASN terutama gaji dan tunjangan diharapkan dapat dilakukan tepat waktu, dengan mempertimbangkan posisi kas pemda.
2. Proses pengadaan barang dan jasa agar dipercepat.
3. Segera melakukan koordinasi dengan LKPP terkait dengan pengadaan e-katalog yang barangnya belum tersedia.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan IV 2018 diperkirakan mencapai 96,98%. Realisasi pendapatan APBD agregat provinsi Maluku sampai dengan akhir 2018 diperkirakan sebesar Rp13.876,95 miliar atau 96,98% dari pagu. Hal-hal yang diperkirakan tidak mencapai target adalah PAD dan dana transfer. Dengan melihat konsumsi rumah tangga yang hanya mampu tumbuh 3,06% pada triwulan I 2018, maka PAD yang sumber utamanya dari pajak restoran dan hotel diperkirakan akan terealisasi 87% dari pagu. Sementara dana transfer diperkirakan akan terealisasi 98,01%.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% thd pagu	Rp	% thd pagu
Pendapatan Daerah	14.308,47	3.187,96	22,28	13.876,95	96,98
Belanja Daerah	14.982,11	1.379,25	9,20	13.925,56	92,94
Surplus/Defisit	(673,64)	1.808,72	-268,50	(-48,61)	7,21

Realisasi belanja sampai dengan triwulan IV 2018 diperkirakan sampai dengan 92,94%. Realisasi Belanja APBD agregat provinsi Maluku sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp13.925,56 miliar atau 92,94% dari pagu. Penghematan alamiah dari sisa kontrak dan permasalahan pengadaan barang dan jasa menyebabkan belanja modal tidak akan terealisasi maksimal. Dari perkiraan pendapatan dan belanja tersebut, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2018 akan terjadi defisit sebesar Rp48,61 miliar atau 7,21% dari pagu.

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Maluku s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018			Kenaikan	2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		Konsolidasi
Pendapatan Negara	343,30	3.187,96	400,69	10,48%	362,67
Pendapatan Perpajakan	253,91	89,91	343,82	18,85%	289,28
Pendapatan Bukan Pajak	89,39	49,04	138,43	5,58%	131,12
Hibah	-	0,07	0,07	5,77%	0,06
Transfer	-	3.048,95	(81,62)	11,25%	(57,79)
Belanja Negara	4.091,32	1.379,25	2.340,00	10,67%	2.114,44
Belanja Pemerintah	960,75	1.324,04	2.284,79	10,33%	2.070,84
Transfer	3.130,57	55,21	55,21	26,62%	43,60
Surplus/(defisit)	(3.748,02)	1.808,72	(1.939,31)	10,71%	(1.751,77)
Pembiayaan		252,82	252,82	17,59%	306,78
Penerimaan Pembiayaan Daerah		266,43	266,43	16,09%	317,53
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		13,61	13,61	26,63%	10,75
Sisa Lebih (kurang) pembiayaan anggaran	(3.748,02)	2.061,54	(1.686,49)	16,71%	(1.444,99)

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Maluku

Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah untuk triwulan I 2018 sebesar Rp3.130,57 miliar

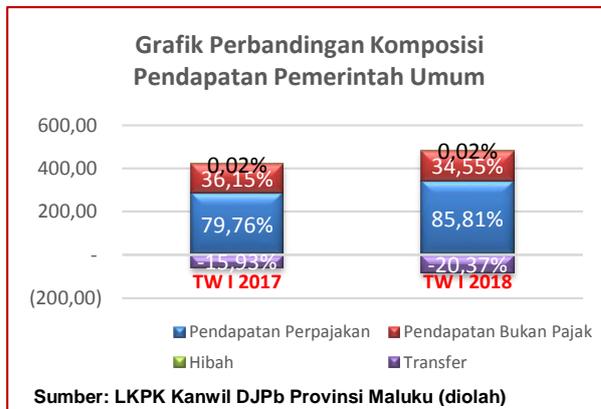
Pendapatan dan Belanja konsolidasian meningkat. Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan I 2018 sebesar Rp400,69 miliar naik 10,48% dibandingkan dengan triwulan I 2017 sebesar Rp362,67 miliar, sementara Belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan I sebesar Rp2.340,00 miliar naik 10,67% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017 sebesar Rp2.114,44 miliar. Naiknya pendapatan pemerintah konsolidasian secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan perpajakan yang tumbuh sebesar 18,85%, pendapatan bukan pajak yang tumbuh sebesar 5,58% dan hibah yang tumbuh sebesar 5,77%. Sedangkan naiknya Belanja Konsolidasian dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja transfer pemerintah. Belanja bantuan sosial naik tinggi khususnya pada daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2018. Belanja Transfer pemerintah naik seiring dengan realisasi dana desa tahap I yang telah disalurkan ke Pemerintah kabupaten/Kota.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Porsi Pendapatan Perpajakan di Provinsi Maluku pada triwulan I 2018 mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendapatan Pemerintah

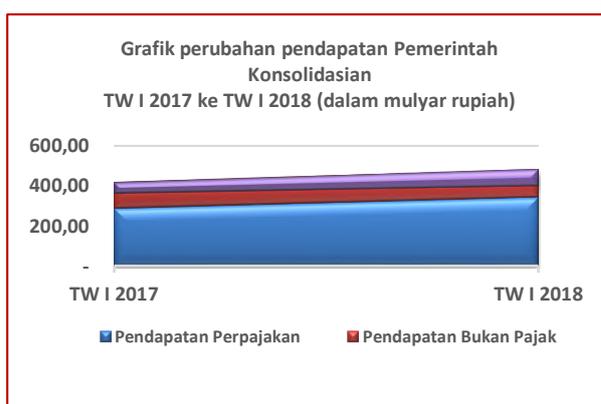
Konsolidasian di provinsi Maluku semakin membaik karena perpajakan yang merupakan sumber utama dari pendapatan mampu tumbuh 18,85%



Dalam Pembentukan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Porsi Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 6,05% dari 79,76% menjadi 85,81%. Hal ini dipengaruhi kenaikan pajak daerah berupa Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sementara pajak pusat juga mampu tumbuh yang

dipengaruhi oleh naiknya PPN sebesar 12,37%. Sementara porsi pendapatan bukan pajak mengalami penurunan dari 36,15% pada triwulan I 2017 menjadi 34,55% pada triwulan I 2018. Penurunan porsi ini dikarenakan kenaikan pendapatan perpajakan lebih besar yaitu mencapai 18,85% sementara pendapatan bukan pajak hanya tumbuh 5,58%, sehingga mengurangi porsi pendapatan bukan pajak dalam membentuk pendapatan Pemerintah Konsolidasian. Sementara untuk Transfer memiliki porsi yang negatif, hal ini disebabkan beberapa penda terjadi *deposit in transit* untuk DAU bulan april. Sehingga penda belum mencatat transfer DAU bulan April yang disalurkan pada akhir Maret oleh pemerintah pusat dikarenakan transfer DAU tersebut baru masuk dalam RKUD pada awal bulan april.

2. Analisis Perubahan



Pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak meningkat.

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian pada triwulan I tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,48% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan perpajakan, pendapatan

bukan pajak dan hibah yang mengalami peningkatan. Pendapatan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 18,85%. Kenaikan ini mengindikasikan telah adanya *extra effort* dari petugas pajak yang mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Sementara Pendapatan Bukan Pajak

mengalami kenaikan 5,58% dipengaruhi oleh kenaikan retribusi daerah dan PNBP sektor pendidikan. Sementara Hibah mengalami kenaikan sebesar 5,77% yang disebabkan oleh adanya pilkada serentak pada 3 pemda di Provinsi Maluku.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap naiknya realisasi pendapatan. Pada Triwulan I tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Maluku sebesar 5,25%. Sementara Pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat naik 10,48% dibanding triwulan I tahun 2017. Kenaikan pendapatan tersebut, menunjukkan bahwa masih adanya potensi penerimaan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Maluku Triwulan I 2017 dan 2018

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	298,28		343,82	18,85%
PNBP	131,12		138,43	5,58%
Total termasuk transfer dan hibah	362,67		400,69	10,48%
PDRB/Pert. Ekonomi	9.572,77	6,48%	10.270,61	5,25%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Maluku, BPS

Pada triwulan I 2018 *Tax ratio* mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Pendapatan perpajakan konsolidasian pada Triwulan I tahun 2018 mampu tumbuh 18,85%. Kenaikan ini mampu untuk meningkatkan *tax ratio* di Provinsi Maluku namun tidak terlalu signifikan. *Tax ratio* mengalami kenaikan pada Triwulan I tahun 2018 dari 3,11% pada triwulan I tahun 2017 menjadi 3,34%. Kenaikan *tax ratio* ini dikarenakan pertumbuhan pendapatan pajak lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB yang sebesar 5,25%. Implementasi Surat Edaran Gubernur Maluku No.188-83 Tahun 2015 tentang peningkatan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan mulai dirasakan di tahun 2018. Surat edaran Gubernur Maluku tersebut meminta setiap perusahaan dimana pun domisilinya dan melaksanakan kegiatan sektor riil di wilayah Maluku, baik rekanan pemerintah maupun tidak untuk memiliki NPWP di Maluku.

Tabel Pendapatan Perpajakan Konsolidasian terhadap PDRB

	Triwulan I 2017	Triwulan I 2018
Pendapatan Perpajakan	298,28	343,82
PDRB	9.572,77	10,270,61
Tax ratio	3,11%	3,34%

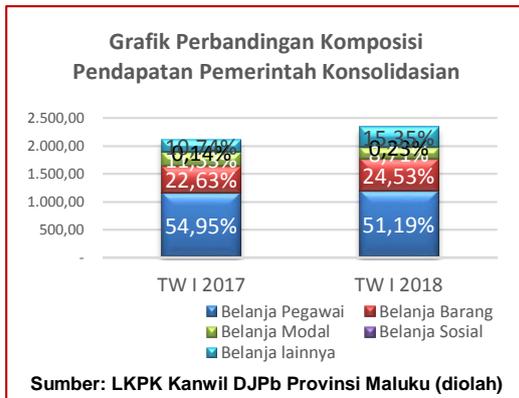
Sumber: LKPK Kanwil DJPb, BPS (diolah)

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Porsi terbesar Belanja Pemerintah Konsolidasian adalah belanja pegawai dan belanja barang. Pada Triwulan I 2018 porsi belanja pegawai sebesar 51,19% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017 yang sebesar

54,95%. Sementara belanja barang mengalami kenaikan dari 22,63% menjadi 24,53%. Belanja modal mengalami penurunan dari 11,33% menjadi 8,71%.



Tingginya porsi belanja pegawai dan barang yang mendominasi belanja Pemerintah Konsolidasian mengindikasikan belanja operasional masih mendominasi di Provinsi Maluku. Meskipun ada perbaikan dengan adanya pengurangan persentase belanja pegawai di triwulan I 2018 namun persentasenya masih tinggi yaitu di atas 50%. Sementara Belanja langsung yang diprosikan dengan belanja modal juga

mengalami penurunan. Hal ini lebih disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung.

2. Analisis Perubahan



Belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial mengalami kenaikan sementara belanja modal mengalami penurunan.

Belanja Pemerintah Konsolidasian secara agregat pada triwulan I 2018 mengalami kenaikan 10,67% apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017. Belanja pegawai mengalami kenaikan 3,09%, belanja barang mengalami kenaikan 19,94% dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan 83,43%, sementara belanja

modal mengalami penurunan 16,48%. Kenaikan belanja pegawai dipengaruhi oleh naiknya gaji pegawai akibat naik pangkat dan Kenaikan gaji berkala. Sementara naiknya belanja barang dipengaruhi oleh naiknya belanja operasional akibat persiapan pilkada serentak. Sementara penurunan belanja modal dipengaruhi oleh DAK Fisik yang sampai triwulan I yang belum terealisasi. Terlambatnya rencana kegiatan dan pengadaan barang dan jasa menjadi penyebab DAK Fisik sampai dengan triwulan I belum terealisasi.

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap Jumlah Penduduk mengalami kenaikan.

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk pada triwulan I 2018 sebesar Rp1,39 juta lebih tinggi dari triwulan I 2017 sebesar Rp1,21 juta. Semakin naiknya rasio ini mengindikasikan bahwa jumlah manfaat yang diterima oleh masyarakat Maluku terhadap belanja APBN dan APBD semakin meningkat.

	TW I 2018	TW I 2018
Belanja Konsolidasian	2..114.442.184.382,29	2.339.997.000.658,64
Jumlah Penduduk Maluku	1.744.654	1.773.776
Rasio	1.211.955,02	1.319.217,87

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Dari data laporan operasional dapat dianalisis kontribusi pemerintah dalam PDRB.

	TW I 2018	PDRB	% atas PDRB	Nasional (2017)
Revenue	3.591,41	10.270,61	34,96%	15,5%
Expenses	2.862,93		27,87%	15,6%
Gross operating balance	728,48		7,09%	1,0%
Net acquisition of non financial assets	203,70		1,93%	2,2%
Net lending/borrowing	524,78		5,10%	-2,3%

Sampai dengan Triwulan I 2018 Provinsi Maluku mampu mendanai belanja dari pendapatan yang diterima. *Net lending/borrowing* terhadap PDRB Provinsi Maluku sebesar 5,10% lebih tinggi dari tingkat nasional -2,3%. Artinya pendapatan yang diterima di Maluku pada triwulan I 2018 mampu membiayai seluruh belanja pada triwulan I 2018. Hal ini dipengaruhi oleh dana transfer pemerintah pusat untuk menutupi pembiayaan, sementara belanja masih rendah. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi di Maluku sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Sementara apabila dianalisis lebih lanjut dengan rumus PDRB maka kontribusi Pemerintah secara spesifik dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Konsumsi Pemerintah	2.862,93
PDRB	10.270,61
Kontribusi	27,87%

Kontribusi pemerintah dalam PDRB di Provinsi Maluku sebesar 27,87% menunjukkan bahwa APBN dan APBD di provinsi Maluku menjadi stimulus fiskal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu percepatan realisasi APBN dan APBD yang proposional diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah

PMTB	203,70
PDRB	10,271
Kontribusi	0,019

Kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Maluku sebesar 1,9%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah pada triwulan I 2018 berkontribusi 1,9% terhadap PDRB. Rendahnya kontribusi belanja modal terhadap PDRB dikarenakan pada triwulan I 2018 belanja modal masih rendah yang dikarenakan masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa.

V. BERITA/ISU FIKAL REGIONAL TERPILIH

A. Rakyat Maluku Sejahtera Dari *Cash For Work* Dana Desa

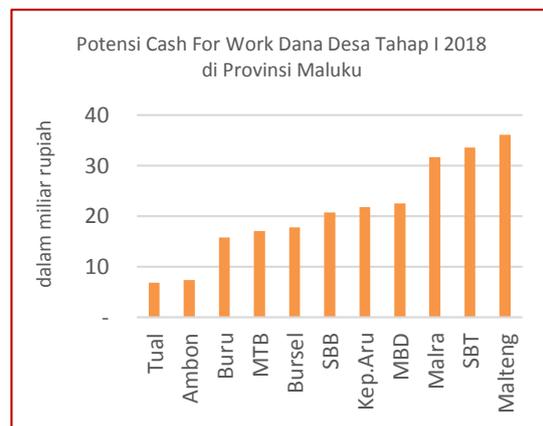


Kunjungan Presiden RI pada Program Cash For Work di Desa Batu Merah Ambon

Program Padat Karya dengan *Cash For Work* Dana Desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dana Desa untuk tahap I tahun 2018 di provinsi Maluku telah tersalurkan seluruhnya pada Bulan Maret 2018. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam pengelolaan Dana Desa 2018, diharapkan mampu meningkatkan

daya beli masyarakat desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dimunculkan Program Padat Karya.

Berdasarkan realisasi Dana Desa Tahap I 2018 di Provinsi Maluku sebesar Rp192,69 miliar. Dengan asumsi 30% Dana Desa dimanfaatkan untuk program *cash for work* maka diperkirakan uang tunai sejumlah Rp57,80 miliar mengalir langsung ke masyarakat desa di Maluku. Secara tahunan potensi uang yang mengalir ke masyarakat desa sebesar Rp288,92 miliar yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Maluku

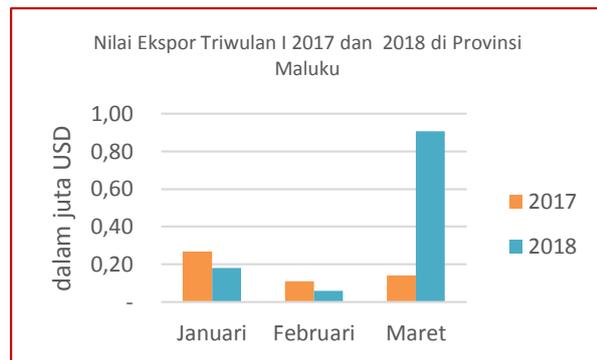
Dampak dari program *cash for work* diharapkan mampu menekan kemiskinan di Provinsi Maluku dibawah 15%, menekan pengangguran dibawah 6%, serta meningkatkan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi rumah tangga yang pada triwulan I 2018 masih belum tumbuh maksimal.

Untuk dapat sukses dalam implementasi program *cash for work* maka direkomendasikan:

1. Pemerintah Daerah harus mampu mendorong pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan memanfaatkan pendamping dana desa.
2. Keterbukaan informasi Dana Desa kepada masyarakat,
3. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah
4. Pelaksanaan kegiatan harus mengedepankan dari desa dan untuk desa (tenaga kerja, bahan jika tersedia harus dari desa).

B. Maluku Ekspor Perdana Tuna Segar langsung dari Ambon

Nilai ekspor Provinsi Maluku meningkat signifikan. Ekspor Maluku bulan Maret 2018 mencapai nilai USD 0,91 juta atau terjadi kenaikan sekitar 1.431,38% dibandingkan ekspor Bulan Februari 2018 yang sebesar USD 0,06 juta. Secara kumulatif nilai ekspor Maluku Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018 sebesar USD 1,15 juta yang berarti merupakan kenaikan sebesar 120,72% dibandingkan periode yang



Sumber: BPS Provinsi Maluku



kegiatan ekspor langsung tujuan Australia sesuai dengan dokumen ekspor yang diterbitkan kantor Bea Cukai (BC) Ambon

sama tahun 2017 yang sebesar USD 0,52 juta. Kenaikan ekspor yang sangat signifikan tersebut tidak terlepas dari telah dilaksanakan ekspor non migas secara langsung melalui Pelabuhan Yos Sudarso, pelabuhan Dobo dan Bandara Pattimura berupa ikan tuna segar jenis *yellowfin*, kerapu dan udang langsung menuju negara

tujuan Australia Singapura dan Amerika Serikat. Hal ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena selama ini ekspor yang dilaksanakan oleh Provinsi Maluku biasanya melewati pelabuhan/bandara di luar Maluku, sehingga nilai ekspor tercatat menjadi milik daerah tersebut.

Dampak dari kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor secara signifikan dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku yang selama ini masih mengandalkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Terkait dengan ekspor langsung dari Maluku dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemda diharapkan melakukan sosialisasi kepada eksportir untuk dapat memanfaatkan ekspor langsung
2. Organisasi Perangkat Daerah perlu untuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bea Cukai, Stasiun Karantina, Pelabuhan Yos Sudarso, PT. Angkasa Pura Bandara Pattimura Ambon dan Garuda Indonesia untuk kebutuhan dokumen ekspor langsung dari Ambon.
3. Eksportir diharapkan meningkatkan nilai tambah dari produk ekspor sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Provinsi Maluku.

Sumber Berita Fiskal :

www.ekonomi.inilah.com

www.mexpose.com

www.news.kkp.go.id

www.kabartimur.co.id

www.malukupost.com

www.antarafoto.com

www.ekonomi.kompas.com

www.dpmpstp-maluku.com

www.viva.co.id

www.infonawacita.com